

Keterlibatan Perangkat Desa dalam Tata Kelola Perpustakaan Desa: Studi di Desa Sibua, Kabupaten Kampar

Faisal Hamid Maka Raja¹, Daeng Ayub², Tri Handoko³, Wilasari Arien⁴, M. Jais⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. E-mail: faisal.hamid@lecturer.unri.ac.id¹, daengayub@lecturer.unri.ac.id², tri.handoko@lecturer.unri.ac.id³, wilasariarien@lecturer.unri.ac.id⁴, muhammadjais@lecturer.unri.ac.id⁵.

Abstract: *This study aims to analyze community participation in the management of Sibua Village Park, Tapung District, Kampar Regency, focusing on forms of community participation, factors influencing participation, the role of the village government, and challenges in park management. The study employed a qualitative approach with a case study design and was conducted over six months in 2026. Fourteen informants were selected purposively, consisting of the village head, village officials, park managers, community leaders, and local park users. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, involving data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. Data credibility was strengthened through source, technique, and time triangulation. The findings indicate that community participation was manifested through collective community service activities (gotong royong), park cleanliness maintenance, utilization of the park as a social interaction space, and involvement in village activities. Participation tended to be more evident when the village government communicated information openly and directly involved community members in activities. Factors influencing participation included community awareness, communication, village leadership, time availability, and perceived benefits. The village government functioned as a facilitator, motivator, and coordinator, while the main challenges included budget limitations, suboptimal coordination, and the absence of a sustainable management mechanism. These findings indicate that sustainable village park management requires an integrated contribution from the village government, community participation, effective communication, and coordination among stakeholders.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Desa Sibua, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang meliputi bentuk partisipasi masyarakat, faktor yang memengaruhi partisipasi, peran pemerintah desa, serta kendala dalam pengelolaan taman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan pada tahun 2026. Informan dipilih secara purposive sampling dan berjumlah 14 orang, yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, pengelola taman, tokoh masyarakat, serta masyarakat pengguna taman. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, pemeliharaan kebersihan, pemanfaatan taman sebagai ruang interaksi sosial, serta keterlibatan dalam kegiatan desa. Partisipasi cenderung lebih terlihat ketika pemerintah desa menyampaikan informasi secara terbuka dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan. Faktor yang memengaruhi partisipasi meliputi kesadaran masyarakat, komunikasi, kepemimpinan

Article History

Received: 24-07-26

Reviewed: 12-08-26

Published: 15-09-26

Key Words

Community Participation, Village Park, Village Government, Collaborative Governance, Participatory Development.

Sejarah Artikel

Diterima: 24-07-26

Direview: 12-08-26

Diterbitkan: 15-09-26

Kata Kunci

Partisipasi Masyarakat, Taman Desa, Pemerintah Desa, Tata Kelola Kolaboratif, Pembangunan Partisipatif.

pemerintah desa, ketersediaan waktu, dan manfaat yang dirasakan. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator, sedangkan kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, koordinasi yang belum optimal, dan belum adanya mekanisme pengelolaan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan taman desa memerlukan keterpaduan antara peran pemerintah desa, partisipasi masyarakat, komunikasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

How to Cite: Raja, F. H. M., Ayub, D., Handoko, T., Arien, W., & Jais, M. (2026). Keterlibatan Perangkat Desa dalam Tata Kelola Perpustakaan Desa: Studi di Desa Sibauk, Kabupaten Kampar. *Transformasi : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 12(2), 721–737. <https://doi.org/10.33394/jtni.v12i2.22050>

PENDAHULUAN

Perpustakaan desa merupakan salah satu institusi yang berperan penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan akses informasi, peningkatan literasi, dan pemberdayaan masyarakat. Seiring berkembangnya paradigma pembangunan berbasis masyarakat, perpustakaan desa tidak lagi dipandang sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning center*) yang mendorong peningkatan kapasitas individu maupun komunitas (Presetyo, 2025). Fungsi tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menegaskan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UU RI Nomor 43 Tahun, 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk mengembangkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui penguatan kelembagaan perpustakaan desa (UU RI Nomor 6, 2014).

Dalam perkembangannya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mendorong transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan akses informasi, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi (Hidayat, 2022). Konsep tersebut menempatkan perpustakaan sebagai ruang kolaborasi yang membutuhkan dukungan pemerintah desa, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan agar mampu menjalankan fungsi edukatif, informatif, dan pemberdayaan secara berkelanjutan (Reisya Salsabila, 2026).

Dalam konteks Desa Sibauk, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Perpustakaan Desa Gemar Membaca merupakan salah satu fasilitas publik yang dikembangkan pemerintah desa untuk memperluas akses informasi dan mendukung pembelajaran masyarakat. Perpustakaan ini memiliki ruang baca, rak buku, meja dan kursi baca, lemari penyimpanan, serta koleksi yang mencakup buku pengetahuan umum, pendidikan, agama, pertanian, kesehatan, keterampilan, buku anak-anak, dan bacaan populer. Selain layanan peminjaman, perpustakaan juga dimanfaatkan untuk kegiatan membaca bersama, pendampingan belajar anak, diskusi kelompok, dan kegiatan edukatif lainnya. Namun, hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa pengelolaannya masih menghadapi beberapa keterbatasan, antara lain sebagian koleksi yang sudah lama dan mulai mengalami kerusakan, sistem administrasi yang masih dilakukan secara manual, keterbatasan sumber daya manusia pengelola, serta keterbatasan sarana pendukung. Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat juga belum optimal; kunjungan pada hari biasa relatif rendah dan kegiatan literasi belum berlangsung secara rutin setiap bulan. Dari sisi pendanaan, pengembangan perpustakaan masih

menghadapi keterbatasan karena dukungan anggaran harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan desa lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas perpustakaan belum secara otomatis menjamin optimalnya fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat.

Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan desa masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Daeng Ayub mengenai Partisipasi Pemuka Masyarakat Dalam Pengelolaan Perpustakaan di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan menemukan bahwa keberhasilan perpustakaan sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah desa dalam implementasi kebijakan, penyediaan sumber daya, serta pembinaan kelembagaan (Ayub, 2022). Sebaliknya, keterbatasan anggaran, rendahnya dukungan organisasi, dan minimnya koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor yang menghambat keberlanjutan layanan perpustakaan.

Penelitian Ainun Nurul Latifah juga menunjukkan bahwa strategi pengelolaan perpustakaan desa harus didukung oleh perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, kepemimpinan yang efektif, serta evaluasi berkelanjutan agar perpustakaan dapat berkembang sebagai pusat sumber belajar masyarakat (Ainun Nurul Latifah, 2024). Studi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan koleksi atau fasilitas, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kelembagaan yang melibatkan pemerintah desa secara aktif.

Dalam perspektif collaborative governance, pengelolaan fasilitas publik tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah sebagai pengambil keputusan, tetapi juga pada hubungan antara pemerintah, pengelola, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dibangun melalui komunikasi, koordinasi, dialog, pembagian peran, serta upaya mencapai tujuan bersama. Perspektif ini relevan dalam pengelolaan perpustakaan desa karena keberlanjutan layanan tidak hanya ditentukan oleh keputusan pemerintah desa, tetapi juga oleh kapasitas pengelola, keterlibatan masyarakat, dan hubungan dengan lembaga atau mitra yang mendukung pengembangan perpustakaan. Dengan demikian, keterlibatan perangkat desa dapat dipahami sebagai bagian dari proses tata kelola yang menghubungkan kewenangan pemerintah desa dengan kebutuhan pengelola, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kajian yang lebih luas mengenai tata kelola pemerintahan desa juga menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh jaringan tata kelola (*governance networks*) yang dibangun pemerintah desa (Fataruba, 2025). Pemerintahan desa yang kolaboratif, transparan, dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterlibatan perangkat desa bukan hanya sebagai pemberi dukungan administratif, tetapi sebagai bagian dari mekanisme tata kelola kolaboratif yang menghubungkan kebijakan dan sumber daya pemerintah desa dengan kapasitas pengelola, partisipasi masyarakat, serta kemitraan dalam pengembangan Perpustakaan Desa Gemar Membaca. Analisis difokuskan pada perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi untuk memahami bagaimana keterlibatan masing-masing unsur perangkat desa dijalankan dalam mendukung pengelolaan dan keberlanjutan perpustakaan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak semata-mata terletak pada lokasi penelitian, tetapi pada analisis pola keterlibatan kelembagaan dan hubungan antaraktor dalam tata kelola perpustakaan desa.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterlibatan perangkat desa bukan hanya sebagai pemberi dukungan administratif, tetapi sebagai bagian dari mekanisme tata kelola kolaboratif yang menghubungkan kebijakan dan sumber daya pemerintah desa dengan kapasitas pengelola, partisipasi masyarakat, serta kemitraan dalam pengembangan Perpustakaan Desa Gemar Membaca. Analisis difokuskan pada perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi untuk melihat bagaimana keterlibatan masing-masing unsur perangkat desa berkontribusi terhadap keberlanjutan pengelolaan perpustakaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak menjadikan lokasi penelitian sebagai satu-satunya unsur kebaruan, tetapi menekankan pola keterlibatan kelembagaan dan hubungan antaraktor dalam tata kelola perpustakaan desa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab empat pertanyaan: (1) bagaimana bentuk keterlibatan perangkat Desa Sibuk dalam pengelolaan Perpustakaan Desa Gemar Membaca? (2) bagaimana dukungan kelembagaan pemerintah desa terhadap keberlanjutan perpustakaan? (3) apa saja faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan perpustakaan? dan (4) strategi apa yang diperlukan untuk memperkuat tata kelola Perpustakaan Desa Gemar Membaca?

Penelitian ini bertujuan menganalisis keterlibatan perangkat Desa Sibuk dalam tata kelola Perpustakaan Desa Gemar Membaca, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi; menganalisis dukungan kelembagaan pemerintah desa terhadap keberlanjutan perpustakaan; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterlibatan perangkat desa; serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan tata kelola perpustakaan berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan Perpustakaan Desa Gemar Membaca serta hubungan kerja dengan pengelola perpustakaan, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Penelitian tidak diarahkan untuk mengukur tingkat literasi masyarakat secara kuantitatif, tetapi untuk memahami proses, bentuk, dan dinamika keterlibatan perangkat desa dalam tata kelola perpustakaan desa.

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan Perpustakaan Desa Gemar Membaca di Desa Sibuk, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu kasus tertentu, yaitu pengelolaan Perpustakaan Desa Gemar Membaca sebagai fasilitas publik dalam konteks sosial dan kelembagaan pemerintahan desa. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman, pandangan, proses, serta dinamika keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan perpustakaan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan (Creswell, 2021; Moleong, 2021).

Penelitian dilaksanakan di Perpustakaan Desa Gemar Membaca, Desa Sibuk, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau selama enam bulan, yaitu April-September 2026, yang meliputi tahap persiapan penelitian, studi pendahuluan, pengumpulan data, analisis data, interpretasi temuan, dan penyusunan laporan. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* karena Desa Sibuk memiliki perpustakaan desa yang dikembangkan sebagai sarana informasi, literasi, dan pembelajaran masyarakat serta

melibatkan pemerintah desa dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut sesuai dengan fokus penelitian mengenai keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan perpustakaan desa.

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama (*human instrument*) yang terlibat langsung dalam menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, memahami konteks lapangan, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan. Peneliti dibantu oleh pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan format dokumentasi untuk menjaga keterarahan proses pengumpulan data (Moleong, 2021; Sugiyono, 2022).

B. Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang relevan dengan pengelolaan atau pemanfaatan Perpustakaan Desa Gemar Membaca (Sugiyono, 2022). Berdasarkan data penelitian, terdapat 9 orang informan, yang terdiri atas unsur pemerintah desa, pengelola perpustakaan, lembaga desa, tokoh masyarakat, dan pengguna layanan perpustakaan.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No.	Kode Informan	Jabatan/Status	Jumlah	Kriteria Pemilihan
1	KI-01	Kepala Desa Sibuk	1 orang	Memiliki kewenangan dan pengetahuan mengenai kebijakan serta arah pengelolaan perpustakaan desa
2	IU-01	Sekretaris Desa	1 orang	Mengetahui administrasi, koordinasi, dan perencanaan program perpustakaan
3	IU-02	Kepala Urusan Keuangan	1 orang	Mengetahui pengelolaan dan pengalokasian anggaran yang berkaitan dengan perpustakaan
4	IU-03	Kepala Seksi Kesejahteraan	1 orang	Mengetahui program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan perpustakaan
5	IU-04	Pengelola Perpustakaan Desa	1 orang	Terlibat langsung dalam pengelolaan operasional dan pelayanan perpustakaan
6	P-01	Ketua BPD	1 orang	Mengetahui dukungan dan fungsi pengawasan kelembagaan desa
7	IP-02	Tokoh Masyarakat	1 orang	Mengetahui kondisi dan manfaat perpustakaan bagi masyarakat
8	IP-03	Pengunjung Perpustakaan	1 orang	Memanfaatkan layanan dan fasilitas perpustakaan
9	IP-04	Pelajar	1 orang	Memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar
Total			9 orang	

Sumber: Data penelitian, 2026.

Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh variasi informasi mengenai keterlibatan perangkat desa, dukungan kelembagaan, pengelolaan operasional, serta pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan perpustakaan. Kecukupan informasi dipertimbangkan berdasarkan relevansi dan kedalaman data yang diperoleh dari masing-masing informan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati kondisi Perpustakaan Desa Gemar Membaca, fasilitas yang tersedia, koleksi perpustakaan, aktivitas layanan, kegiatan literasi, serta bentuk keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan perpustakaan. Observasi juga digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan yang dapat dibandingkan dengan informasi hasil wawancara.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada sembilan informan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk keterlibatan perangkat desa, dukungan pemerintah desa, perencanaan, koordinasi, pendanaan, pelaksanaan program, pembinaan, evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat pengelolaan perpustakaan. Wawancara semi-terstruktur memberikan ruang bagi peneliti untuk menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sekaligus mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan (Sugiyono, 2022).

Wawancara dilakukan sebanyak 9 sesi, dengan satu sesi untuk setiap informan dan durasi sekitar 30-60 menit. Dengan persetujuan informan, wawancara direkam menggunakan perangkat perekam suara dan dilengkapi dengan catatan lapangan. Rekaman wawancara kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk teks untuk memudahkan proses pengkodean dan analisis data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto kegiatan, arsip desa, dokumen pengelolaan perpustakaan, dokumentasi kegiatan literasi, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan membandingkan informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

D. Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (drawing and verifying conclusions). Analisis dilakukan secara interaktif sejak data mulai dikumpulkan hingga diperoleh pola dan temuan yang konsisten dengan fokus penelitian (Miles et al., 2014).

Tahap pertama adalah transkripsi dan pengorganisasian data. Data hasil wawancara ditranskripsikan dalam bentuk teks, sedangkan catatan observasi dan dokumentasi diorganisasikan berdasarkan sumber data dan fokus penelitian.

Tahap kedua adalah coding awal. Peneliti membaca data secara berulang dan memberikan kode pada informasi yang relevan, seperti perencanaan, koordinasi, pendanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, fasilitas, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan kendala pengelolaan.

Tahap ketiga adalah kategorisasi data. Kode-kode yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas. Misalnya, kode perencanaan kegiatan, pengambilan keputusan, dan penyusunan kebutuhan perpustakaan dikelompokkan ke dalam kategori perencanaan dan pengambilan keputusan.

Tahap keempat adalah pembentukan tema. Kategori yang saling berkaitan dikembangkan menjadi tema penelitian, yaitu (1) keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan perpustakaan; (2) dukungan kelembagaan pemerintah desa; (3) faktor pendukung dan penghambat; dan (4) penguatan tata kelola perpustakaan.

Tahap kelima adalah penyajian data. Data yang telah dikategorikan disajikan dalam bentuk uraian tematik, tabel, dan kutipan informan yang relevan untuk melihat pola dan hubungan antartemuan.

Tahap keenam adalah triangulasi dan verifikasi. Informasi hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi. Informasi dari pemerintah desa juga dibandingkan dengan keterangan pengelola, BPD, tokoh masyarakat, pengunjung, dan pelajar sesuai dengan relevansi informasi yang diberikan.

Tahap ketujuh adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik setelah pola dan hubungan antartemuan diverifikasi dan diarahkan untuk menjawab fokus penelitian mengenai keterlibatan perangkat desa, dukungan kelembagaan, faktor pendukung dan penghambat, serta penguatan tata kelola perpustakaan.

E. Keabsahan Data dan Etika Penelitian

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai kelompok informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Moleong, 2021; Sugiyono, 2022).

Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian. Informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, informasi yang diperlukan, penggunaan data, serta hak informan sebelum proses wawancara dilakukan. Persetujuan informan diperoleh sebelum wawancara dan perekaman dilakukan. Identitas informan dilindungi dengan menggunakan kode informan dalam proses analisis dan penyajian hasil penelitian. Penggunaan dokumentasi dan data yang berasal dari pemerintah desa dilakukan dengan memperhatikan izin dari pihak terkait. Peneliti juga menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang memengaruhi proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan beberapa bentuk keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan Perpustakaan Desa Gemar Membaca di Desa Sibuk. Temuan tersebut meliputi keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, koordinasi, pengalokasian anggaran, dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi. Selain itu, ditemukan beberapa kondisi yang masih menjadi perhatian dalam pengelolaan perpustakaan, terutama berkaitan dengan anggaran, koleksi, sumber daya manusia, sarana pendukung, dan pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Temuan penelitian disajikan dalam empat tema sesuai dengan fokus penelitian.

1. Keterlibatan Perangkat Desa dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perangkat Desa Sibuk dalam pengelolaan Perpustakaan Desa Gemar Membaca terlihat sejak proses identifikasi

kebutuhan, perencanaan program, pengambilan keputusan, koordinasi dengan pengelola, hingga dukungan terhadap operasional perpustakaan. Keterlibatan tersebut tidak hanya berlangsung pada saat kegiatan dilaksanakan, tetapi juga muncul dalam proses penyusunan kebutuhan perpustakaan.

Kepala Desa Sibuk (KI-01) menjelaskan bahwa pemerintah desa memberikan ruang kepada pengelola perpustakaan untuk menyampaikan kebutuhan sebelum program desa ditetapkan.

“Perpustakaan ini memang kami anggap penting. Walaupun desa punya banyak program lain yang juga harus dijalankan, perpustakaan tetap kami usahakan supaya berjalan. Setiap kali menyusun program desa, pengelola perpustakaan kami minta menyampaikan apa saja kebutuhan yang diperlukan. Jadi bukan hanya pemerintah desa yang menentukan, tetapi kami dengarkan juga masukan dari pengelolanya. Dengan begitu program yang disusun lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.” (KI-01, wawancara, 12 Mei 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan perpustakaan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah desa dan pengelola. Hal yang sama disampaikan Sekretaris Desa (IU-01), yang menjelaskan bahwa pembahasan dengan pengelola dilakukan sebelum musyawarah desa.

“Biasanya sebelum musyawarah desa kami sudah berdiskusi dulu dengan pengelola perpustakaan. Kami tanyakan kondisi perpustakaan sekarang seperti apa, apa saja yang masih kurang, dan kegiatan apa yang ingin dilaksanakan. Setelah semua usulan terkumpul baru kami bahas bersama dalam rapat pemerintah desa. Jadi prosesnya tidak langsung diputuskan begitu saja.” (IU-01, wawancara, 13 Mei 2026).

Keterlibatan perangkat desa juga ditemukan pada aspek pendanaan. Kepala Urusan Keuangan (IU-02) menjelaskan bahwa dukungan anggaran diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan pembangunan lainnya.

“Kalau untuk anggaran perpustakaan memang kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Kami tidak bisa langsung memenuhi semua kebutuhan karena ada banyak program lain yang juga harus dibiayai. Tetapi setiap tahun tetap kami usahakan ada anggaran, walaupun bertahap. Yang penting perpustakaan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti.” (IU-02, wawancara, 13 Mei 2026).

Dari sisi pengelola, IU-04 menyampaikan bahwa komunikasi dengan pemerintah desa berlangsung terbuka, meskipun tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus.

“Selama saya mengelola perpustakaan, pemerintah desa cukup terbuka. Kalau ada kebutuhan kami biasanya langsung menyampaikan kepada kepala desa atau sekretaris desa. Memang belum semuanya bisa dipenuhi, tetapi mereka selalu berusaha membantu sesuai kemampuan. Jadi kami merasa tetap diperhatikan.” (IU-04, wawancara, 14 Mei 2026).

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pengembangan perpustakaan beberapa kali menjadi bagian dari agenda pembahasan pemerintah desa. Dokumentasi juga memperlihatkan adanya kegiatan perpustakaan yang melibatkan masyarakat dengan dukungan pemerintah desa.

Dengan demikian, berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, keterlibatan perangkat desa ditemukan terutama dalam perencanaan, koordinasi, pengambilan keputusan, pengalokasian anggaran, dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan perpustakaan. Pada saat yang sama, data menunjukkan bahwa pemenuhan

kebutuhan perpustakaan dilakukan secara bertahap karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan prioritas pembangunan lainnya.

2. Dukungan Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Perpustakaan

Dukungan pemerintah Desa Sibuk terhadap Perpustakaan Desa Gemar Membaca ditemukan dalam bentuk koordinasi, pendanaan, fasilitasi sarana, serta dukungan terhadap kegiatan literasi. Dukungan tersebut diberikan melalui hubungan kerja antara pemerintah desa dan pengelola perpustakaan.

Sekretaris Desa (IU-01) menjelaskan bahwa pemerintah desa melakukan komunikasi dengan pengelola ketika terdapat kebutuhan maupun kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Kami sering berkomunikasi dengan pengelola perpustakaan. Kalau mereka menyampaikan ada kebutuhan atau ada kegiatan yang akan dilaksanakan, kami coba bantu koordinasikan. Misalnya kalau ada kegiatan membaca bersama atau lomba untuk anak-anak, pemerintah desa biasanya ikut mendukung supaya kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik.” (IU-01, wawancara, 13 Mei 2026).

Dukungan juga diberikan melalui pengalokasian anggaran. IU-02 menyampaikan bahwa kebutuhan perpustakaan tetap diperhatikan dalam penyusunan anggaran, meskipun jumlahnya harus disesuaikan dengan program pembangunan lainnya.

“Setiap penyusunan anggaran kami tetap memperhatikan kebutuhan perpustakaan. Memang nominalnya tidak besar karena harus dibagi dengan program pembangunan yang lain. Tetapi kami berusaha supaya perpustakaan tetap memperoleh anggaran untuk kebutuhan operasional maupun perbaikan fasilitas secara bertahap.” (IU-02, wawancara, 13 Mei 2026).

Pengelola perpustakaan juga memberikan gambaran mengenai bentuk dukungan yang dirasakan secara langsung.

“Selama ini pemerintah desa cukup membantu. Waktu kami mengusulkan penambahan rak buku, perbaikan meja baca, dan pengecatan ruangan, pemerintah desa berusaha memfasilitasi. Memang belum semuanya langsung dipenuhi, tetapi kami melihat ada perhatian dan kemauan untuk membantu.” (IU-04, wawancara, 14 Mei 2026).

Hasil observasi menunjukkan bahwa perpustakaan telah memiliki ruang baca, rak buku, dan fasilitas pendukung, tetapi masih terdapat keterbatasan pada penataan koleksi dan fasilitas baca. Dokumentasi juga menunjukkan adanya fasilitas perpustakaan dan kegiatan yang didukung oleh pemerintah desa.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah desa tidak hanya berupa anggaran, tetapi juga berupa komunikasi, koordinasi, fasilitasi sarana, dan dukungan terhadap kegiatan perpustakaan. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan karena dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan desa.

3. Kendala Pengelolaan Perpustakaan Desa

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kondisi yang mendukung pengelolaan perpustakaan, terutama komunikasi antara pemerintah desa dan pengelola, dukungan pemerintah desa, serta inisiatif pengelola dalam memperbaiki pelayanan.

Pengelola perpustakaan (IU-04) menjelaskan bahwa upaya peningkatan pelayanan dilakukan melalui penataan koleksi, kebersihan ruang baca, dan kegiatan yang ditujukan untuk menarik masyarakat.

"Kami berusaha membuat perpustakaan lebih nyaman supaya masyarakat betah datang. Buku-buku mulai kami tata kembali sesuai kelompoknya, ruang baca dibersihkan setiap hari, dan kalau ada kegiatan kami usahakan suasananya menarik. Kami juga ingin menambah koleksi buku yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekolah maupun masyarakat umum." (IU-04, wawancara, 14 Mei 2026).

Namun, data penelitian juga menunjukkan beberapa hambatan. Dari sisi koleksi, IU-04 menjelaskan:

"Kalau menurut saya, yang masih kurang itu koleksi bukunya. Banyak pengunjung, terutama anak sekolah, mencari buku pelajaran terbaru atau buku pengetahuan umum, tetapi koleksi yang kami miliki masih terbatas. Sebagian besar buku merupakan bantuan yang sudah cukup lama, sehingga belum semuanya sesuai dengan kebutuhan pembaca sekarang." (IU-04, wawancara, 14 Mei 2026).

Keterbatasan juga ditemukan pada sumber daya manusia pengelola. IU-04 menyampaikan:

"Pengelola perpustakaan jumlahnya masih terbatas. Kadang kalau ada kegiatan desa atau kegiatan lain, pelayanan perpustakaan juga ikut terganggu. Selain itu kami juga belum pernah mengikuti pelatihan khusus tentang pengelolaan perpustakaan, jadi masih banyak yang kami pelajari secara mandiri." (IU-04, wawancara, 14 Mei 2026).

Dari perspektif masyarakat, IP-02 melihat bahwa pemanfaatan perpustakaan belum merata.

"Menurut saya perpustakaan ini sudah cukup bagus, tetapi memang masyarakat yang datang belum terlalu banyak. Biasanya yang sering datang itu anak-anak sekolah. Orang dewasa masih jarang memanfaatkan perpustakaan karena mungkin mereka lebih sibuk bekerja atau belum terbiasa membaca di perpustakaan." (IP-02, wawancara, 15 Mei 2026).

Pandangan tersebut diperkuat oleh pengunjung perpustakaan (IP-03), tetapi dengan penjelasan yang berbeda mengenai penyebabnya:

"Kalau ada kegiatan biasanya ramai, tetapi kalau hari biasa memang pengunjung tidak terlalu banyak. Menurut saya mungkin masyarakat belum tahu kalau sekarang perpustakaan sudah lebih baik dan bisa dimanfaatkan untuk belajar atau mencari informasi." (IP-03, wawancara, 15 Mei 2026).

Dengan demikian, terdapat variasi pandangan mengenai pemanfaatan perpustakaan. Tokoh masyarakat mengaitkan rendahnya kunjungan dengan kesibukan masyarakat dan kebiasaan membaca, sedangkan pengunjung melihat kurangnya informasi mengenai keberadaan dan fungsi layanan sebagai salah satu kemungkinan penyebab.

Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa koleksi buku belum tersusun berdasarkan klasifikasi tertentu, jumlah meja dan kursi baca masih terbatas, serta administrasi pelayanan masih dilakukan secara manual melalui buku peminjaman. Dokumentasi juga menunjukkan beberapa rak belum terisi secara optimal dan sebagian koleksi mulai mengalami kerusakan akibat usia pemakaian.

Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan literasi telah dilaksanakan, tetapi belum berlangsung secara rutin setiap bulan. Kondisi tersebut menjadi bagian dari

gambaran empiris mengenai keterbatasan pengelolaan perpustakaan pada saat penelitian dilakukan.

4. Strategi Penguatan Pengelolaan Perpustakaan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penguatan pengelolaan Perpustakaan Desa Gemar Membaca dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain peningkatan koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola, pembenahan pelayanan, penataan dan penambahan koleksi, peningkatan kapasitas pengelola, kegiatan literasi, serta pengembangan kerja sama dengan pihak lain.

Pada tingkat layanan, IU-04 menjelaskan bahwa pengelola melakukan pembenahan terhadap koleksi dan ruang baca serta berupaya membuat kegiatan yang lebih menarik bagi masyarakat.

Pengelola juga menyampaikan kebutuhan peningkatan kapasitas melalui pelatihan:

"Kami berharap ke depan ada pelatihan khusus bagi pengelola perpustakaan desa. Selama ini kami belajar sendiri dari pengalaman. Kalau ada pelatihan tentang pengelolaan perpustakaan atau penggunaan aplikasi perpustakaan tentu akan sangat membantu meningkatkan pelayanan." (IU-04, wawancara, 14 Mei 2026).

Dari sisi kegiatan, dokumentasi menunjukkan adanya kegiatan membaca bersama, bimbingan belajar bagi anak-anak, penataan ruang perpustakaan, penambahan beberapa koleksi buku, serta rapat koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola perpustakaan. Dokumentasi juga menunjukkan adanya kerja sama dengan sekolah melalui kegiatan kunjungan belajar ke perpustakaan desa.

Hasil observasi menunjukkan adanya pembenahan koleksi berdasarkan jenis bacaan, pembersihan ruang baca, papan informasi mengenai tata tertib, serta kegiatan membaca bersama yang melibatkan anak-anak sekolah dasar. Observasi juga menunjukkan adanya koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola dalam mempersiapkan kegiatan literasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan dilakukan melalui perbaikan layanan, pengembangan koleksi, peningkatan kapasitas pengelola, kegiatan literasi, koordinasi, dan kemitraan. Namun, pelaksanaannya masih berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang dimiliki perpustakaan dan pemerintah desa

Pembahasan

1. Otoritas Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Perpustakaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sibuk memiliki posisi penting dalam pengelolaan Perpustakaan Desa Gemar Membaca melalui perencanaan, pengambilan keputusan, koordinasi, pengalokasian anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Keterlibatan tersebut terlihat dari adanya komunikasi antara pemerintah desa dan pengelola dalam mengidentifikasi kebutuhan serta membahas program perpustakaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perangkat desa tidak hanya berkaitan dengan dukungan administratif, tetapi juga dengan penggunaan kewenangan pemerintah desa untuk menghubungkan kebutuhan perpustakaan dengan kebijakan dan sumber daya desa. Ayub (2022) menunjukkan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perpustakaan desa, khususnya dukungan pemerintah desa dalam penyediaan

sumber daya dan pembinaan kelembagaan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini bahwa pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam menciptakan kondisi kelembagaan yang memungkinkan perpustakaan tetap menjalankan fungsi layanan kepada masyarakat. Fataruba (2025) menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang melibatkan hubungan antarpihak dan koordinasi dalam pelaksanaan program masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola menjadi mekanisme yang memungkinkan kebutuhan perpustakaan disampaikan, dibahas, dan diakomodasi sesuai kemampuan desa.

Dengan demikian, otoritas pemerintah desa dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai otoritas yang menyediakan arah kebijakan, koordinasi, dan dukungan sumber daya, bukan sebagai satu-satunya aktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan perpustakaan. Efektivitas dukungan tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah desa mengoordinasikan sumber daya dengan kebutuhan pengelola dan masyarakat.

2. Kapasitas Pengelola sebagai Penghubung Kebijakan dan Layanan

Keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan perpustakaan perlu diikuti dengan kapasitas pengelola yang memadai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelola memiliki peran dalam menjalankan pelayanan, menata koleksi, menjaga ruang baca, melaksanakan kegiatan literasi, mengelola administrasi, serta menyampaikan kebutuhan perpustakaan kepada pemerintah desa.

Temuan ini sejalan dengan Latifah (2024) yang menekankan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi dalam pengelolaan perpustakaan. Dengan demikian, kualitas pengelolaan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi perpustakaan. Dewi dan Rustiarini (2021) juga menunjukkan pentingnya pengelolaan dan dukungan fasilitas dalam pengembangan budaya literasi masyarakat. Temuan tersebut memperkuat pemahaman bahwa pengembangan perpustakaan membutuhkan kombinasi antara dukungan kelembagaan, fasilitas, dan kemampuan pengelola.

Dengan demikian, hubungan antara pemerintah desa dan pengelola bersifat saling melengkapi. Pemerintah desa menyediakan dukungan sesuai kewenangannya, sedangkan pengelola menerjemahkan dukungan tersebut menjadi layanan dan kegiatan. Keterbatasan pada salah satu unsur dapat memengaruhi efektivitas unsur lainnya.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Perpustakaan

Partisipasi masyarakat merupakan dimensi penting dalam keberlanjutan perpustakaan karena perpustakaan desa pada dasarnya disediakan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pembelajaran masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah memanfaatkan Perpustakaan Desa Gemar Membaca, terutama anak-anak dan pelajar, tetapi pemanfaatan tersebut belum berlangsung secara konsisten pada seluruh kelompok masyarakat.

Maskurotunitsa dan Rohmiyati (2023) menempatkan perpustakaan desa sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan akses informasi dan peningkatan pengetahuan. Hidayat (2022) juga menekankan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang diarahkan pada peningkatan akses informasi, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut memerlukan lebih dari sekadar penyediaan ruang dan koleksi. Perpustakaan perlu menyediakan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat agar masyarakat memiliki alasan untuk datang dan menggunakan layanan secara berkelanjutan.

4. Jejaring Kemitraan dalam Penguatan Tata Kelola

Pengelolaan perpustakaan desa juga tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan pihak di luar struktur pemerintah desa. Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan antara pemerintah desa, pengelola, masyarakat, serta pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan literasi dan pemanfaatan perpustakaan.

Fataruba (2025) menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan melalui koordinasi dan hubungan antarpihak. Sementara itu, Reisy Salsabila (2026) menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan lingkungan literasi. Kedua temuan tersebut relevan dengan kondisi Perpustakaan Desa Gemar Membaca yang membutuhkan dukungan lebih luas daripada pemerintah desa dan pengelola saja.

Dalam konteks penelitian ini, jejaring kemitraan dapat berfungsi untuk memperluas sumber daya, pengetahuan, kegiatan, dan akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan. Sekolah, perguruan tinggi, komunitas literasi, lembaga pemerintah, dan kelompok masyarakat dapat menjadi mitra potensial dalam pengembangan program.

Namun, temuan penelitian belum menunjukkan bahwa jejaring tersebut telah menjadi mekanisme kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan. Karena itu, pengembangan kemitraan perlu diarahkan dari hubungan yang bersifat kegiatan tertentu menuju kerja sama yang lebih terencana, dengan pembagian peran yang jelas.

Hal ini juga berkaitan dengan keberlanjutan. Apabila pengelolaan terlalu bergantung pada dukungan pemerintah desa atau individu tertentu, keberlanjutan program berpotensi mengalami kendala ketika terjadi perubahan kepemimpinan atau prioritas pembangunan. Penelitian ini tidak mengamati secara langsung kondisi setelah pergantian kepemimpinan desa, sehingga hal tersebut diposisikan sebagai implikasi kelembagaan, bukan sebagai temuan empiris.

5. Hubungan Otoritas, Kapasitas, Partisipasi, dan Jejaring Kemitraan

Keempat dimensi tersebut tidak berdiri sendiri. Otoritas pemerintah desa menyediakan kebijakan, koordinasi, dan sumber daya; kapasitas pengelola menentukan bagaimana dukungan tersebut diterjemahkan menjadi layanan; partisipasi masyarakat menentukan tingkat pemanfaatan dan relevansi layanan; sedangkan jejaring kemitraan dapat memperluas sumber daya dan kapasitas pengembangan perpustakaan.

Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai suatu rangkaian yang saling memengaruhi. Dukungan pemerintah desa memperkuat kapasitas pengelola meningkatkan kualitas layanan mendorong pemanfaatan masyarakat memperkuat kebutuhan akan jejaring kemitraan. Sebaliknya, keterbatasan pada salah satu dimensi dapat membatasi perkembangan dimensi lainnya.

Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan perpustakaan membutuhkan hubungan kerja antaraktor, bukan hanya dukungan dari satu institusi. Fataruba (2025) menegaskan pentingnya hubungan

kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan, sedangkan Ayub (2022) menunjukkan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perpustakaan desa.

Dengan demikian, tata kelola Perpustakaan Desa Gemar Membaca dapat dipahami sebagai proses yang menghubungkan kewenangan pemerintah desa, kapasitas pengelola, partisipasi masyarakat, dan jejaring kemitraan. Keempatnya perlu diperkuat secara bersamaan agar pengelolaan perpustakaan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu berkembang sebagai ruang pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.

6. Batas Tata Kelola Kolaboratif dan Keberlanjutan Pengelolaan

Temuan penelitian menunjukkan adanya praktik komunikasi, koordinasi, pelibatan pengelola, dukungan anggaran, dan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Praktik tersebut menunjukkan adanya unsur tata kelola kolaboratif, tetapi belum cukup untuk menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif telah terbentuk secara penuh dan mapan.

Keterbatasan tersebut terlihat dari beberapa kondisi. Pertama, dukungan anggaran masih bergantung pada kemampuan keuangan desa dan harus bersaing dengan kebutuhan pembangunan lainnya. Kedua, kapasitas pengelola masih perlu diperkuat melalui pelatihan dan peningkatan kemampuan pengelolaan. Ketiga, pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat belum konsisten. Keempat, jejaring kemitraan masih perlu diperluas dan dilembagakan.

Penelitian ini juga tidak menemukan bukti adanya konflik terbuka antara pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat. Namun, terdapat potensi perbedaan kepentingan dalam penentuan prioritas anggaran karena kebutuhan perpustakaan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan desa lainnya. Dengan demikian, persoalan yang ditemukan lebih tepat dipahami sebagai negosiasi prioritas dan keterbatasan sumber daya, bukan sebagai konflik antaraktor.

Keberlanjutan juga perlu ditempatkan dalam perspektif kelembagaan. Dukungan pemerintah desa penting, tetapi mekanisme pengelolaan sebaiknya tidak terlalu bergantung pada komitmen personal satu pemimpin. Pembagian tugas, prosedur pengelolaan, mekanisme evaluasi, pengembangan kapasitas pengelola, serta jejaring kemitraan perlu diperkuat agar pengelolaan dapat terus berjalan ketika terjadi perubahan kepemimpinan atau kebijakan desa.

7. Posisi Temuan terhadap Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini memperkuat hasil Ayub (2022) mengenai pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dan dukungan pemerintah desa dalam pengelolaan perpustakaan. Temuan juga sejalan dengan Latifah (2024) yang menekankan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi dalam pengelolaan perpustakaan.

Pada aspek literasi dan pemberdayaan, temuan penelitian sejalan dengan Hidayat (2022) mengenai pentingnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial serta Maskrotunitsa dan Rohmiyati (2023) mengenai fungsi perpustakaan desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Fataruba (2025) memberikan dukungan konseptual terhadap pentingnya hubungan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang menghubungkan keterlibatan perangkat desa dengan kapasitas pengelola, partisipasi masyarakat, dan jejaring kemitraan dalam satu konteks pengelolaan perpustakaan desa. Dengan demikian, temuan penelitian tidak menempatkan dukungan pemerintah desa sebagai satu-satunya penjelasan, tetapi melihat pengelolaan perpustakaan sebagai proses yang melibatkan beberapa dimensi yang saling berhubungan.

Kontribusi penelitian ini karena itu dirumuskan secara lebih hati-hati, yaitu memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana keterlibatan perangkat desa berinteraksi dengan kapasitas pengelola, partisipasi masyarakat, dan jejaring kemitraan dalam pengelolaan perpustakaan desa pada konteks Desa Sibuk. Karena penelitian dilakukan pada satu lokasi dengan pendekatan kualitatif, temuan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh perpustakaan desa.

KESIMPULAN

Keterlibatan perangkat Desa Sibuk dalam pengelolaan Perpustakaan Desa Gemar Membaca berlangsung melalui perencanaan, koordinasi, pendanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Temuan menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah desa, tetapi juga pada kapasitas pengelola, partisipasi masyarakat, dan jejaring kemitraan. Keterbatasan anggaran, koleksi, kompetensi pengelola, sarana pendukung, dan belum konsistennya pemanfaatan masyarakat masih menjadi tantangan. Secara teoretis, temuan ini memperlihatkan bahwa tata kelola perpustakaan desa perlu dipahami sebagai hubungan antarpihak yang mengintegrasikan kewenangan pemerintah, kapasitas pengelola, partisipasi masyarakat, dan kemitraan. Penelitian ini terbatas pada satu perpustakaan desa dengan pendekatan kualitatif, sehingga temuannya bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada seluruh perpustakaan desa.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan pengelolaan Perpustakaan Desa Gemar Membaca diprioritaskan pada: (1) penyusunan rencana pengembangan perpustakaan yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat; (2) penyediaan anggaran secara berkelanjutan sesuai kemampuan desa; (3) peningkatan kompetensi pengelola melalui pelatihan; (4) pembaruan koleksi berdasarkan kebutuhan pengguna; (5) pengembangan layanan berbasis teknologi informasi; (6) pelaksanaan program literasi yang melibatkan masyarakat secara lebih aktif; (7) penguatan kemitraan dengan sekolah, perguruan tinggi, dan pihak terkait; serta (8) pelaksanaan evaluasi secara berkala untuk memantau perkembangan layanan dan keberlanjutan pengelolaan perpustakaan. Bagi penelitian selanjutnya, kajian dapat dilakukan pada beberapa perpustakaan desa dengan pendekatan komparatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai variasi tata kelola perpustakaan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sibuk, pengelola Perpustakaan Desa Gemar Membaca, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta seluruh informan yang telah memberikan informasi, waktu, dan dukungan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses pengumpulan data dan penyelesaian penelitian ini. Penelitian ini tidak memperoleh pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, institusi, maupun pihak eksternal.

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan, analisis, dan publikasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aulia, K. N. (2023). Village community participation in village development. *The Journal of Socio-Legal and Islamic Law*, 1(2), 9–14. <https://doi.org/10.30651/jssl.v1i2.20800>
- Ayub, D. (2022). Partisipasi pemuka masyarakat dalam pengelolaan perpustakaan desa. *STIKIP Pesel*, 7(2), 238–242. <https://doi.org/10.34125/kp.v7i2.746>
- Chambers, R. (1983). *Rural development: Putting the last first*. Longman Scientific & Technical.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Du, Y. (2011). Enhancing social inclusion of rural libraries: A community outreach approach. In *Proceedings of the 2011 iConference* (pp. 728–729). *Association for Computing Machinery*. <https://doi.org/10.1145/1940761.1940860>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hidayat, F. R. (2022). Pemanfaatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan program SDGs Indonesia 2030. *Pustakawan*, 29(3), 309–322. <https://doi.org/10.37014/medpus.v29i3.3448>
- Igalla, M. (2021). Institutionalization or interaction: Which organizational factors help community-based initiatives acquire government support? *Public Administration*, 99(4), 803–831. <https://doi.org/10.1111/padm.12728>
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?* World Bank.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Nadhiro, R. A., & Choiriyah, I. U. (2024). Community participation in village development planning. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1). <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1366>
- Nugrahani, T. S., Suharni, S., & Saptatiningsih, R. I. (2019). Potential of social capital and community participation in village development. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 12(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.15775>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Prihatin, S. D., Khoir, S., Priyanto, I. F., Aliwijaya, A., Wardani, T. R. K., & Dewandaru, D. A. K. (2024). Community development in rural public libraries: Supporting social inclusion and library transformation. *Ibersid*, 18(2), 75–86. <https://doi.org/10.54886/ibersid.v18i2.5013>
- Reisya Salsabila. (2026). Partisipasi masyarakat Kampung Pekijing dalam mewujudkan



- kampung literasi di Kota Serang. *Silatene: Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 44–58.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Saffanah, A., Cussoy, A., Suharso, P., Soedarto, J. P., & Tembalang, K. U. (2026). Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Semarang. *ANUVA*, 10(2), 438–451.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Tsuchiya, M. (2021). The concept of social inclusion in community libraries in London. *Journal of Japan Society of Library and Information Science*, 67(2), 87–103. https://doi.org/10.20651/jslis.67.2_87